

Pengaruh Tingkat Pengungkapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2013 – 2015)

Umi Nur Azizah¹ Noviansyah Rizal² M. Munir³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
uminurazizah96@gmail.com

Abstrak

Masalah timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan di Inggris maupun di Amerika pada tahun 1980-an diakibatkan karena budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif. Hal ini menyadarkan orang akan perlunya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dalam suatu perusahaan sering terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, inilah pusat dari pengaturan yang menjadi objek perlunya penerapan Tata Kelola Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan GCG dan ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Teknik analisis yang digunakan berupa uji statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen dan uji statistik t yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat transparansi GCG dan ukuran dewan komisaris secara bersama – sama berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : transparansi GCG, ukuran dewan komisaris, nilai perusahaan

Abstract

The problem of the great scandals that afflicted companies in Britain and America in the 1980s was due to the greedy culture and the aggressive takeover of companies. This makes people aware of the need for a good corporate governance system. In a company there is often a struggle between personal freedom and collective responsibility, this is the center of the arrangement that becomes the object of the need for the implementation of Good Corporate Governance. This study aims to examine the effect of GCG disclosure, board size, on firm value. This research uses sample of go public manufacturing company and listed in Indonesian Stock Exchange period 2013-2015 period. Data analysis tool used in this research is multiple regression. The analytical technique used in the form of statistical test F which shows whether all independent variables included in the model have a mutual influence on the dependent variable and statistical test t which shows how far the influence of one independent variable individually in explaining the variation of the dependent variable with a significant level of 5%. The results of this study indicate that GCG transparency has a positive and significant effect on corporate value, the size of the board of commissioners has a positive and significant effect on corporate value. From the analysis results can be concluded that the level of transparency GCG and board size, together affect the company's value simultaneously.

Keywords: GCG transparency, board size, corporate value

PENDAHULUAN

Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980an berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif lebih menyadarkan orang akan perlunya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Bagaimanapun juga dalam suatu perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari pengaturan yang menjadi obyek perlunya penerapan corporate Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG).

ADB menekankan pentingnya langkah-langkah reformasi *good corporate governance* pada sejumlah perusahaan di negara-negara tersebut. Reformasi ini dapat digolongkan menjadi empat bidang, (1) Struktur kepemilikan korporat, (2) Perlindungan kendali internal dan pemegang saham korporat, (3) Pengawasan dan disiplin eksternal, dan (4) Pengembangan pasar modal dan pembiayaan korporat.

Iskander dan Chamliou (2000) dalam Hidayah (2008) misalnya, menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro

namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *Under-regulated*, lemahnya pengawasankomisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Sebagai akibat tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia, seperti Enron, WorldCom, dan Arthur Andersen mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor serta telah menarik banyak perhatian dan perdebatan Internasional. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sudah merupakan hal penting yang perlu diterapkan di Indonesia, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola dana publik seperti perusahaan yang terdaftar di bursa efek, perusahaan perbankan, dan perusahaan BUMN.

Menurut Barcelius Ruru (*op.cit*), Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara kelola perusahaan berdasarkan *rules* yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UU PT), dan aturan-aturan tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Awalnya isu *Corporate Governance* timbul karena berkembangnya bentuk perseroan, terutama karena perseroan itu *go public*, sehingga pemilik perusahaan pada umumnya tidak menjadi pengelola atau manajemen perusahaan. Dalam kondisi seperti itu masalah keagenan, yaitu menjamin bahwa manajemen akan selalu bertindak dalam kerangka kepentingan pemilik perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORITIS

Teori Agensi

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan kontrak antara *principal* dan *agent*. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manager (agen) di suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini menunjukkan bahwa agen itu mahal, menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang dikenal sebagai teori agensi (*agency theory*).

Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen selalu bertindak demi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Zaki Baridwan, 2001).

Dengan demikian *Good Corporate Governance* bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemiliknya (*stakeholder*) tetapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).

Prinsip-prinsip GCG

Terdapat lima konsep dalam Good Corporate Governance :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)
Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time and costs*).
2. *Accountability* (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.
Akuntabilitas juga diartikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan.
3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-lainnya.
4. *Independency* (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Transparansi GCG

Konsep *corporate governance* pertama kali diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada tahun 1999 melalui sebuah komite yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: 20 KEP/31/M.EKUI/08/1999, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Komite ini kemudian menerbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia pada tahun 2001. Menurut Prinsip dasar Transparansi yang sesuai dengan Pedoman *Good Corporate Governance*, dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (TJS), perusahaan (dan pihak lain) harus menyediakan informasi yang benar dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi dalam konteks sosial mengandung unsur keterbukaan, komunikasi dan bertanggung gugat. Prosedur transparansi meliputi pertemuan terbuka untuk umum, keterbukaan pelaporan keuangan, peraturan hak memperoleh informasi, audit, dsb. Transparansi tidak berarti semua informasi harus dibagi ke semua pihak lain, karena ada informasi yang bersifat bukan untuk umum atau rahasia. Namun ada keharusan untuk menyebarkan informasi minimum kepada pihak lain misalnya tentang tujuan kegiatan, cara bekerja, prinsip yang dianut, dampak terhadap lingkungan dan tindakan mengatasinya. Semua hal ini harus tercantum dalam laporan tahunan yang terbuka untuk umum.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *raad van commissarissen*. Oleh karena itu, konsep dewan komisaris memiliki banyak persamaan dengan *raad van commissarissen* di Belanda. Dewan komisaris harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi. Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), sedikitnya sepertiga dari anggota komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI merupakan komisaris independen. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengenai komisaris independen, ditetapkan jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Lastanti, 2004).

Dewan komisaris merupakan bagian dari *corporate governance*. Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner dkk (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner dkk (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham.

Menurut Arthur J Keown, pengertian nilai perusahaan adalah nilai pasar dari hutang dan ekuitas perusahaan. Modal yang diinvestasikan sedikit lebih problematis, secara konseptual modal yang diinvestasikan perusahaan merupakan jumlah dari seluruh dana yang telah diinvestasikan di dalamnya. Tobin's Q atau biasa disebut juga *Q ratio* atau *Q Teori* diperkenalkan pertama kali oleh James Tobin pada tahun 1969, mengajukan hipotesis bahwa nilai pasar suatu perusahaan seharusnya sama dengan biaya penggantian aktiva perusahaan tersebut sehingga menciptakan keadaan ekuilibrium. Karena adanya modal intelektual inilah suatu perusahaan sering dinilai lebih oleh pasar.

Pengaruh Tingkat Pengungkapan GCG terhadap Nilai Perusahaan

Tingkat pengungkapan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor publik akan aman. Kepercayaan investor publik pada manajemen perusahaan memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk pengurangan *cost of capital* (biaya modal). Dengan demikian, pengungkapan atas penerapan *good corporate governance* berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di mata investor (Labelle, 2002).

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Collier dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executive Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Dengan proporsi kepemilikan yang cukup tinggi, maka manajer akan

merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya. Hal tersebut didasarkan pada logika, bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan.

Pengaruh Tingkat Transparansi GCG dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Indonesian Institute for Corporate Governance (2000) dalam Arifin (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dan tujuan utamanya meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* yang lain. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Vafeas (2000) mengatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Persepektif ini memandang dewan sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting (Dalton dan Daily, 1999 dalam Young, dkk 2001). Peran ini sangat berguna mengingat sumber daya yang langka justru dapat menciptakan keuntungan yang kompetitif (Canner dan Prahalad, 1996 dalam Young, dkk 2001). Anggota dewan yang melakukan *cross-directorship* memiliki pengalaman dan informasi yang lebih luas yang diharapkan akan berguna bagi perusahaan dibandingkan dengan anggota dewan yang tidak melakukan *cross-directorship*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas dengan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif, dimana data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah kemudian dengan menguji hipotesis yang sudah diajukan dengan teknik statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengungkapan GCG dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015. Objek penelitian ini adalah laporan tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan sumber data eksternal perusahaan dimana data yang diperoleh telah dipublikasikan dalam website BEI (www.idx.co.id). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dan studi kepustakaan.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance tahun 2013-2015.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan tersebut mempublikasikan *annual report* tahun 2013-2015 yang dapat diakses melalui *website* perusahaan dan *website* BEI (<http://www.idx.co.id>). Ini menunjukkan bahwa informasi yang terdapat dalam *annual report* perusahaan dapat diakses oleh publik dengan mudah (*accessible*).
2. Kelengkapan data perusahaan. Hal ini berarti semua variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini disajikan dalam laporan tahunan perusahaan.
3. Distribusi *unstandardized data* normal. Hal ini berarti, data yang menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria tersebut harus dikeluarkan dari sampel, karena syarat berlakunya model adalah terpenuhinya kriteria tersebut.

Maka diperoleh 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode laporan 2013-2015 sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Asumsi Klasik Linier Berganda

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah adanya data yang digunakan tersebut bebas dari masalah normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heterokedastisitas. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi maka akan menyebabkan bisa pada hasil penelitian.

Uji Normalitas

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa grafik histogram hampir membentuk lonceng atau pola distribusi mendekati normal. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dependen dan independen dalam model regresi mempunyai distribusi normal.

Sedangkan untuk hasil normal *probability plot*, di bawah terlihat dan menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, tidak berkumpul disatu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

- 1) Nilai *Tolerance* untuk variabel *Transparansi GCG* sebesar $0,987 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,014 < 10$, sehingga variabel *Transparansi GCG* dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 2) Nilai *Tolerance* untuk variabel *Ukuran Dewan Komisaris* sebesar $0,987 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $0,014 < 10$, sehingga variabel *Ukuran Dewan Komisaris* dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel di bawah ini, hasil uji diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 0,752. Menurut Sunyoto "Nilai DW hitung terletak diantara -2 dan +2 atau $(-2 < DW < +2)$ " berarti tidak terjadi autokorelasi.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan analisis regresi dengan 2 variabel bebas (*Transparansi GCG* dan *Ukuran Dewan Komisaris*) dan variabel terikat Nilai Perusahaan maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi *Unstandardized coefficients* adalah sebagai berikut :

$$Y = -6,506 + 7,199X_1 + 8,152X_2 + \epsilon$$

Adapun yang dimaksud (interpretasi) dari persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

- a = -6,506: merupakan konstanta (a) yang menunjukkan apabila tanpa dipengaruhi oleh variabel X_1 (*Transparansi GCG*) dan X_2 (*Ukuran Dewan Komisaris*) maka besarnya Nilai Perusahaan adalah - 6,506.
- b₁ = 7,199: merupakan nilai koefisien regresi variabel X_1 (*Transparansi GCG*) yang menunjukkan bahwa apabila nilai *transparansi GCG* mengalami peningkatan sebesar 1% maka Nilai Perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 7,199.
- b₂ = 8,152: merupakan nilai koefisien regresi variabel X_2 (*Ukuran Dewan Komisaris*) yang menunjukkan bahwa apabila nilai *Ukuran Dewan Komisaris* mengalami peningkatan sebesar 1% maka Nilai Perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 8,152.

2. Uji Hipotesis

Uji t

Dalam Uji T α (alpha) 0,05 pada variabel independen tersebut setelah diuji menghasilkan temuan sebagai berikut :

1. Pada variabel independen *Transparansi GCG* ditemukan bahwa nilai signifikannya $\leq 0,05$ yaitu 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa H₁ diterima dan hal ini berarti *Transparansi GCG* berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
2. Pada variabel independen *Ukuran Dewan Komisaris* ditemukan bahwa nilai signifikannya $\leq 0,05$ yaitu 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa H₂ diterima dan hal ini berarti *Ukuran Dewan Komisaris* berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Uji F

Dari tabel ANOVA diperoleh nilai *Fhitung* = 19,260 dan *Ftabel* = 3,06. Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikasi pengaruh X_1 dan X_2 berpengaruh secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $19,260 > F_{tabel}$ 3,06 sehingga bisa disimpulkan H₃ dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y.

Koefisien Determinasi

Dalam perhitungan dari model regresi ini menghasilkan nilai R square (R^2) sebesar 0,218 artinya adalah variabel Nilai Perusahaan mampu dijelaskan oleh variabel *Transparansi GCG* dan *Ukuran Dewan Komisaris* sebesar 21,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Variabel independen (*Transparansi GCG* dan *Ukuran Dewan Komisaris*) secara keseluruhan berdistribusi terhadap variabel dependen (Nilai Perusahaan) sebesar 21,8% dan sisanya sebesar 78,2% dari variabel lain yang tidak dibahas dan diteliti dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Hipotesis I

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa secara parsial Transparansi GCG berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang berpartisipasi dalam pengungkapan laporan perusahaan di media online khususnya Bursa Efek Indonesia. Banyak negara melalui penetapan undang-undang atau karena kesadaran yang makin dalam, perusahaan-perusahaan telah menerapkan apa yang disebut *social responsibility* yang terdapat dalam GCG terhadap para *stakeholders* yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. (Barcelius, *op. cit.*)

Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan akan mendorong peningkatan pengungkapan *corporate governance*. Sebaliknya, semakin kecil perusahaan, maka terjadi pula penurunan pengungkapan *corporate governance*.

Sehingga disimpulkan hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Johan Wahyudi (2010) yang berjudul "Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Cross-Directorship* Dewan terhadap Nilai Perusahaan" yang menyatakan transparansi GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Pembahasan Hipotesis II

Dari hasil pengujian, diketahui Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya ukuran dewan komisaris yang lebih banyak akan mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan mengupayakan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan juga semakin baik dan menyebabkan investor percaya untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga pada umumnya harga saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan semakin meningkat (Dechow et al, 1996). Sehingga bisa disimpulkan hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Johan Wahyudi (2010) yang berjudul "Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance*, Ukuran Dewan Komisaris dan Tingkat *Cross-directorship* Dewan terhadap Nilai Perusahaan" menyebutkan Ukuran Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan.

3. Pembahasan Hipotesis III

Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa transparansi GCG dan ukuran dewan komisaris secara bersama - samamempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris merupakan item yang terkandung di dalam tingkat transparansi GCG yang dipublikasikan oleh perusahaan. Jadi apabila item ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan, transparansi GCG yang mengandung item-item lain yang terpenuhi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka akan mempengaruhi hasil penelitian secara simultan. Sehingga bisa disimpulkan hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan beberapa hal berikut :

- Tansparansi GCG berpengaruh signifikan positif pada Nilai Perusahaan. Bisa dijelaskan bahwa variabel transparansi GCG memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
- Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif pada Nilai Perusahaan. Bisa dijelaskan variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.
- Pengungkapan Transparansi GCG dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif secara bersama-sama terhadap Nilai Perusahaan yang artinya dapat dijelaskan secara bersama-sama pengungkapan transparansi GCG dan ukuran dewan komisaris berpengaruh pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

Saran -Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut :

- Bagi Pihak Perusahaan
 - Atas dasar penelitian ini sebaiknya perusahaan harus meningkatkan mutu Nilai Perusahaan yang dihasilkan, dengan cara meningkatkan lagi pengelolaan aktiva yang produktif yang dimiliki terutama pengungkapan penerapan GCG dan ukuran dewan komisaris mengingat kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- Bagi Peneliti Selanjutnya
 - Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah perusahaan yang akan diteliti sehingga sampel penelitian yang digunakan lebih besar.

- b. Penilaian *index*s pengungkapan *corporate governance* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa peneliti sehingga dapat memperkecil tingkat subyektifitas penilaian indeks pengungkapan *corporate governance*.
- c. *Item* pengungkapan diberikan bobot sehingga dapat diperhitungkan tingkat bobot dari masing-masing *item* pengungkapan *corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Aditiawan. 2006. *Perlunya Komisaris Independent dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Koperasi*.Online. (<http://businessenvironment.wordpress.com/2006/10/18/perlunya-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-corporate-governance-di-koperasi/>). Diakses 12 Februari 2018.
- Kartika R., Amilia. 2010. *Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia*. Program Studi Akuntansi : Semarang.
- Kismono, Gugup. 2012. *Bisnis Pengantar Edisi Kedua*. Bpfe – Yogyakarta
- Komite Nasional Kebijakan Governace, 2006.*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.Jakarta.
- Lewis, Mervyn K., Algaoud, Latifa M. 2001. *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktek dan Konsep)*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mentari, S. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Kebijakan Manajemen Keuangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan*.Skripsi. Universitas Muhammadiyah : Surakarta.
- Moeljono, Dr. Djokosantoso. 2005. *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng. 2004. *Manajemen Fit and Proper Test*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Pearce II, John A., Robinson Jr, Richard B. 2008. *Manajemen Strategi – Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10 Buku 1*. Jakarta; Salemba Empat.
- Pradhita, Frysa. 2011. *Analisa Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Pramono A., Ferry. 2011. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan*.Universitas Diponegoro : Semarang.
- Savitri A., Rizka. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*.Skripsi. STIE Widya Gama : Lumajang.
- Thathabastian, 2011.*Prinsip Good Corporate Governance (Gcg)*.(Online). (<http://thathabastian.Blogspot.Co.Id/2011/11/Prinsip-Good-Corporate-Governance-Gcg.Html>). Diakses 26 Januari 2018.
- Wahyudi, Dudi. 2014. *Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan*.Online. (<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19453-dampak-penerapan-good-corporate-governance-terhadap-kepatuhan-pajak-perusahaan>). Diakses 23 Februari 2018.
- Wahyudi,Johan. 2010. *Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance, Ukuran dewan Komisaris dan Cross-Directorship Dewan terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi. Universitas Diponegoro : Semar